**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DESA DI DESA PACCING**

 **KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE**

**OLEH :**

***SUBHAN RASYID***

***FAKULTAS ILMU SOSIAL***

***Email :*** ***subhanrasyid12@gmail.com***

**Subhan Rasyid, 2018.** *Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Perkembangan Ekonomi Desa Di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Zulfadli, SH., M.Hum dan Syarifah Balkis, S.Pd., M.Pd.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Gambaran kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, 2) Gambaran perkembangan ekonomi desa yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, 3) Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Perkembangan Ekonomi Desa yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, dokumentasi, dan angket. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis statistic kuantitatif deskriptif.*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) Gambaran PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone berada dalam kategori “sangat baik” berdasarkan indikator Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar dengan kategori sangat baik, Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan kategori baik, Kegiatan peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi dengan kategori sangat baik, dan Penambahan permodalan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) dengan kategori sangat baik. 2) Gambaran Perkembangan ekonomi desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone tergolong dalam kategori “baik” berdasarkan indikator Strategi dalam memecahkan permasalahan dengan kategori cukup baik, Pencapaian sasaran untuk memecahkan permasalahan dengan kategori baik, Kebijakan pendukung (secara tidak langsung) dengan kategori sangat baik, dan Kebijakan berorientasi program (secara langsung) dengan kategori sangat baik. 3) Serta ada pengaruh yang kuat namun hubungan yang tidak signifikan antara PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan ekonomi desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan serta mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan khususnya di perdesaan.

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana atau prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan ditingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Desa Paccing merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Awangpone Kabupaten Bone yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang memiliki masyarakat yang homogen yakni masyarakatnya hidup diperdesaan dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani. Desa Paccing ini masih memiliki keterbatasan dari segi fasilitas seperti akses jalan yang kurang memadai serta kondisi pertanian yang memprihatinkan para petani dan sebagainya. Disamping itu, tingkat kesejahteraan masyarakat pun masih sangat rendah dimana masih banyak terdapat rumah tangga miskin yang tersebar dibeberapa dusun. Hal ini sangat jelas mendukung untuk didirikannya berbagai macam fasilitas PNPM Mandiri Perdesaan di desa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai PNPM Mandiri Perdesaan yang berjudul **“ Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Perkembangan Ekonomi Desa Di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone ”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone ?
2. Bagaimana gambaran perkembangan ekonomi desa yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone ?
3. Bagaimana Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Perkembangan Ekonomi Desa yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.
2. Untuk Mengetahui gambaran perkembangan ekonomi desa yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone
3. Untuk mengetahui pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan ekonomi desa yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
	* + - 1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut masalah pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan ekonomi desa.
				2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi maupun praktisi dalam mengkaji dan menelaah terhadap PNPM Mandiri Perdesaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial.
				3. Diharapkan penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai bahan acuan bagi pemerintah desa dalam penetapan kebijakan untuk menigkatkan pembangunan.
4. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan ekonomi desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Tinjauan PNPM Mandiri Perdesaan**
1. **Pengertian PNPM Mandiri Perdesaan**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan[[1]](#footnote-2). PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 34, bahwa Negara menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Sebagai upaya untuk melaksanakan amanat pasal tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana pasal 32 menegaskan bahwa Presiden bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 yang merupakan peraturan pelaksana dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai upaya untuk menindak lanjuti program pemerintah tersebut diterbitkan Keputusan Menteri koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Dimana bagian kedua menyebutkan bahwa Program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di kementerian/lembaga yang bergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, masing-masing menetapkan Pedoman Pelaksanaan sesuai kebutuhannya.

1. **Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan**

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (b) pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan partisipatif; (c) pengefektifan dan peran pemerintahan lokal; (d) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (e) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.

1. **Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan**

Dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan;

 Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum : meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan
2. Tujuan Khusus :
3. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
4. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
5. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
6. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
7. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
8. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).
9. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.[[2]](#footnote-3)
10. **Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan**

PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata.
2. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
3. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
5. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.
6. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan,kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
7. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat.
8. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
9. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
10. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harfiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

1. **Keluaran Program**

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasinal (PTO) PNPM Mandiri perdesaan keluaran yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian.
2. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa.
3. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif.
4. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat.
5. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM.
6. Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan pembangunan.
7. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.[[3]](#footnote-4)

Keluaran dari PNPM Mandiri Perdesaan merupakan sebuah hasil dari suatu sistem kebijakan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

1. **Jenis kegiatan PNPM Mandiri**

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat.
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal.
4. Penambahan permodalan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP).[[4]](#footnote-5)

Dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diutamakan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam hal ini berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan, serta didukung oleh sumber daya yang ada dan memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/ satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.

1. **Tinjauan Perkembangan Ekonomi Desa**
2. **Perkembangan Ekonomi**

Istilah Perkembangan Ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan jangka panjang. Akan tetapi beberapa ahli ekonomi tertentu, seperti Schumpter dan Nyoya Ursula Hicks, telah menarik perbedaan yang lebih lazim antara istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi mengacu pada masalah Negara terbelakang sedang pertumbuhan mengacu pada masalah Negara maju.

Selanjutnya menurut Profesor Bonne :

“Perkembangan memerlukan dan melibatkan semacam pengarahan, pengaturan dan pedoman dalam rangka menciptakan kekuatan-kekuatan bagi perluasan dan pemeliharaan. Begitulah yang sebenarnya terjadi pada kebanyakan Negara terbelakang, sedang ciri pertumbuhan spontan merupakan ciri perekonomian maju dengan kebebasan usaha ”.[[5]](#footnote-6)

Perkembangan ekonomi dapat didefinisikan dalam tiga cara:

1. Perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang. Definisi ini tidak mempertimbangkan berbagai perubahan dalam pertumbuhan penduduk. Jika suatu kenaikan dalam pendapatan nasional nyata dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka yang terjadi bukan perkembangan ekonomi tetapi kemunduran.
2. Definisi kedua, berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata perkapita dalam jangka panjang. Para ekonom berpendapat sama dalam mendefinisikan pembangunan ekonomi dalam arti kenaikan pendapatan atau output nyata per kapita. Definisi diatas bermaksud menekankan bahwa bagi perkembangan ekonomi, tingkat kenaikan pendapatan nyata seharusnya lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan penduduk.
3. Ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik tilik kesejahteraan ekonomi. Umpama, perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana pendapatan nasional nyata per kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan.[[6]](#footnote-7)
4. **Perkembangan ekonomi perdesaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan bearada di daerah kabupaten.[[7]](#footnote-8) Disisi lain kata perdesaan memiliki makna yaitu Kawasan atau [wilayah](https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah) yang mempunyai kegiatan utama [pertanian](https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian), termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi [kawasan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan) sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, [pemerintahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan), pelayanan [sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial), dan kegiatan [ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi).

Perencanaan pembangunan daerah tidak hanya penting bagi daerah tetapi juga bagi pembangunan nasional, sebab pembangunan daerah merupakan komponen untuk membangun perekonomian nasional secara menyeluruh. Di samping itu pembangunan daerah dapat melestarikan kebudayaan setempat, menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat dan utamanya mencegah jurang kemakmuran akibat tidak meratanya pembangunan antar daerah yang dapat menimbulkan pengaruh merugikan (*backwash affects*) dan bukan pengaruh menguntungkan (*spread affects*).[[8]](#footnote-9)

Musrembang desa/kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan.[[9]](#footnote-10) Musrembang desa/kelurahan dimaksudkan untuk menyususn rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrembang desa/kelurahan dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.

Menurut Nugroho, kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan haruslah memuat :

1. Strategi dasar dalam memecahkan permasalahan :
2. Ketenagakerjaan yang berwujud pengangguran
3. Akses, kemampuan dan kesempatan terhadap faktor-faktor produksi yang berhubungan dengan kualitas SDM
4. Informasi terhadap pasar yang berwujud kendala-kendala struktural
5. Pencapaian sasaran untuk memecahkan permasalahan :
6. Meningkatnya investasi
7. Meningkatnya kontrak
8. Credible commitment
9. Kebijakan pendukung (secara tidak langsung) :
10. Pembangunan infrastruktur
11. Kebijakan ekonomi makro
12. Kebijakan penataan ruang dan pertanahan
13. Pengembangan partisipasi masyarakat
14. Pemerintahan
15. Membangun kelembagaan
16. Kebijakan berorientasi program (secara langsung) :
17. Akses terhadap sumber daya
18. Akses terhadap teknologi
19. Akses terhadap pasar
20. Akses terhadap sumber-sumber pembiayaan.[[10]](#footnote-11)

Untuk mengaktualisasikan secara optimal strategi kebijakan tersebut di atas, perumusan perencanaan pengembangan ekonomi perdesaan, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna. Sehingga alokasi sumberdaya dan dana yang terbatas dapat menghasilkan output yang optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pembangunan wilayah. Pengalaman yang sangat berharga bagi kita selama ini menjelaskan bahwa program pembangunan desa kurang terkoodinasi dalam suatu sistem yang baik dalam konteks sumberdaya maupun secara fungsional seringkali kurang menjamin dalam tiga hal *endurance* (daya tahan), *integrity* (keutuhan) dan *continuity* (kesinambungan). Pengembangan ekonomi perdesaan haruslah sinergi dari pembangunan wilayah perdesaaan dimana memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

1. **Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.[[11]](#footnote-12)

Menurut Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.[[12]](#footnote-13)

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

umum, partisipasi dan peran aktif pemerintah dalam pelaksanaan PNPM adalah :

1. Menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Khususnya masyarakat miskin.
2. Mendorong “pelembagaan” mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
3. Melakukan audit untuk semua pelaku PNPM-MP dan menjadi wasit.[[13]](#footnote-14)

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menetukan jenis usaha, kondisi wilayah yang ada pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

1. **Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah- masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas :

1. Kognitif adalah kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
2. Konotatif adalah suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan.
3. Psikomotorik adalah kecakapan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktifitas pembangunan.
4. Afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut.

Menurut Paul Freire,

pemberdayaan masyarakat berinti pada suatu metodologi yang disebut *conscientization* yaitu merupakan proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Paradigma ini mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif. Bertolak dari pengertian ini maka sebuah partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pelaksanaan suatu program saja melainkan menyentuh pada nilai politik.[[14]](#footnote-15)

Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa hakikat tujuan pemberdayaan ialah membentuk kekuatan individu dan masyarakat menjadi pribadi yang mandiri. Dengan kemandirian masyarakat bisa membuka akses yang seluas-luasnya agar tidak terjadi monopoli dan dominasi kekuasaan. Sehingga, kelompok masyarakat mampu memanfaatkan potensi maupun sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.

1. **Bentuk-bentuk Kegiatan Pemberdayaan**

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah.

Menurut Ndraha, diperlukan berbagai program pemberdayaan, diantaranya:

1. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar atau *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah. *Bargaing* ini dimaksudkan agar yang diprintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.
2. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban, pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
3. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*), dan perlakuan yang adil terhadap manusia.
4. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.[[15]](#footnote-16)

Dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat yang ada, secara umum pelaksanaan program-program ditingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri yang ada.

Komponen program dalam PNPM Mandiri antara lain mencakup tentang :

1. Pengembangan masyarakat.
2. Bantuan langsung Masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal.
4. Bantuan pengelolaan program.[[16]](#footnote-17)

Keempat kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi penting untuk dilakukan dan diterapkan dalam menunjang dan mempercepat akselerasi kualitas hidup masyarakat yang pada awalnya belum berdaya menjadi berdaya, dan mandiri.

Sementara itu, dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Guna mewujudkan pemberdayaan pemerintahan desa tersebut, maka perlu dikembangkan agar mencapai kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara :

1. Penataan dan pengembangan desa, kerjasama antar desa dan lembaga adat.
2. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintahan desa dan paguyuban pemerintahan desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
4. Meningkatkan ketahanan masyarakat.
5. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
6. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.[[17]](#footnote-18)
7. **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.[[18]](#footnote-19)

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa.

**Kerangka Pikir**

Secara mendasar, pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan merupakan dua hal yang sangat penting dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dari berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang dirancang pemerintah pada akhirnya setiap program tersebut akan bermuara ke desa.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa PNPM Mandiri Perdesaan memiliki berbagai jenis kegiatan diantaranya kegiatan pembangunan, peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan kelompok usaha ekonomi, dan penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan. Dari berbagai jenis kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan tersebut tentunya memberikan dampak/ pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang ada di desa, baik dari segi pendapatan masyarakat maupun dari segi pembangunan.

**C. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pikir pada penelitian ini, maka penelitian menentukan hipotesis.

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Perkembangan Ekonomi Desa Di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Perkembangan Ekonomi Desa Di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

**METODE PENELITIAN**

1. **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Menurut Kerlinger penelitian adalah “proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan berdasarkan teori dan hipotesis atau jawaban sementara”.[[19]](#footnote-20)

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, karena penelitian disini adalah jenis penelitian pengumpulan data dan analisis datanya menggunakan angka kuantitatif. Sedangkan deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan satu variabel dengan satu kelompok.

1. **Variabel Penelitian dan Desain Penelitian**
2. **Variabel Penelitian**

Dalam suatu penelitian, variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian. Maka variabel-variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri bebas (*independen variable*) dan variabel terikat (*dependen variable*). Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah PNPM Mandiri Perdesaan sebagai variabel bebas (X) dan Perkembangan Ekonomi Desa sebagai variabel terikat (Y).

1. **Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan ekonomi desa.

Untuk memudahkan mengetahui proses pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dibuatkan desain penelitian sebagai acuan dalam pengambilan data. Adapun desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

X

Y

*Skema .* Kerangka Desain Penelitian

Keterangan :

X= PNPM Mandiri Perdesaan

Y= Perkembangan Ekonomi Desa

1. **Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran Variabel**
2. **Definisi Operasional Variabel**

Penelitan ini mengkaji dua variabel, yaitu variabel X adalah PNPM Mandiri Perdesaan dan variabel Y adalah Perkembangan Ekonomi Desa. Kedua variabel penelitian tersebut dioperasioanalkan sebagai berikut:

1. PNPM Mandiri Perdesaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone yang berorientasi pemberdayaan seperti kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar, Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain.
2. Perkembangan Ekonomi Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kenaikan pendapatan ekonomi desa dengan menggambarkan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan.
3. **Pengukuran Variabel**

Untuk mengukur variabel penelitian ini maka digunakan instrument berupa angket yang diajukan kepada responden dengan menggunakan skala likert.

Menurut Sugiono, bahwa “skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial.[[20]](#footnote-21)

Dalam skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sama dengan negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberikan skor, misalnya.

1. Sangat setuju /selalu/ sangat positif = Skor 5
2. Setuju/ sering/ positif = Skor 4
3. Kurang Setuju/ kadang-kadang/ netral = Skor 3
4. Tidak Setuju/ hampir tidak pernah/ negatif = Skor 2
5. Sangat tidak setuju/ tidak pernah = Skor 1

Berpedoman dari pendapat diatas , maka untuk menentukan kategori pada PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Perkembangan ekonomi desa, penelitian memilih standar pengukuran yaitu 68-80 dikategorikan sangat baik, 55-67 dikategorikan baik, 42-54 dikategorikan cukup baik, 29-41 dikategorikan kurang baik, dan 16-28 dikategorikan tidak baik.

1. **Populasi Dan Sampel**
2. **Populasi**

Populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian, dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan”. Jadi populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sebanyak 2.506 jiwa yang terbagi dalam lima Dusun.

1. **Sampel**

Sampel adalah suatu representasi/wakil yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi.

Berdasarkan dari populasi yang ada ,maka penulis melakukan penarikan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan sampel *stratified random sampling,* dengan rumus sebagai berikut:

$$n=\frac{N}{N. d^{2}+ 1}$$

Dimana : n = Jumlah sampel

 N = Jumlah populasi

 $d^{2}$ = presisi yang ditetapkan[[21]](#footnote-22)

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini ada beberapa cara yang penulis akan lakukan dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara langsung mendatangi lokasi penelitian. Penulis mengadakan observasi atau pengamatan dan pencatatan secara tidak langsung kepada obyek penelitian. Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi masyarakat sekitar dan kegiatan yang ada di desa khususnya mengenai PNPM Mandiri Perdesaan.

1. Angket

Angket yaitu pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden, dalam hal ini angket diberikan pada masyarakat sebagai responden untuk mengetahui pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan ekonomi desa di desa Paccing kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengetahui data responden yang akan diteliti di di desa Paccing kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis statistik deskriptif adalah teknik data yang bertujuan untuk mendeskripsikan kedua variabel dengan menggunakan analisis persentase dan rata-rata (mean) serta standar deviasi.

1. Persentase

P = $\frac{f}{N}$x100%

dimana: P: angka persentase

 f: frekuensi jawaban responden

 N: jumlah responden/sampel

1. Rata-rata (mean)

M=$\frac{∑Xi}{N}$

dimana : M: rata-rata

 X: Nilai/harga

 N: Jumlah data[[22]](#footnote-23)

1. Standar deviasi

SD = $\frac{\sum\_{x}^{}2}{N}$

dimana: SD : Standar Deviasi

 X: Nilai Harga

 N: Jumlah data[[23]](#footnote-24)

Analis statistik kuantitatif dengan menggungakan teknik Chi kudrat(X2), korelasi *produck moment*, dan regresi sederhana untuk mengetahui seberapa pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan ekonomi desa di desa paccing kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

1. Uji normalitas data

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui kenormalan data tentang pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan ekonomi desa. Uji normalitas yang digunakan adalah rumus Chi Kuadrat dengan rumus:

X$\frac{2}{h}$= $\frac{(f\_{o-f\_{h)2}}}{fh}$

Dimana : X: HargaChi Kuadrat

 fo: Frekuensi yang diobservasi

 fh: Frekuensi yang diharapkan[[24]](#footnote-25)

Kriteria pengujian ini dilakukan dengan membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan harga tabel. Bila harga Chi Kudrat hitung lebih kecil atau sama dengan harga Chi Kudrat ( Hh2≤Xt2), Maka distribusi dinyatakan normal,dan apabila lebih besar(≤) dinyatakan tidak normal.

1. Analisis Regresi liner sederhana

Analisi regresi liner digunakan untuk mengetahui pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan ekonomi desa di desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

Dalam rumus analisi regresi sederhana adalah

 Y= a+bX

 Dimana :

 Y = subjek/nilai dalam variable dependen yang diprediksikan

 a = harga Y bila X = 0 (harga konstanta)

 b = angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan maupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

Kriteria pengujian adalah bilanmana Fhitung lebih besar dari Ftabel pada uji taraf signifikan 5% maka HO  ditolak yang menyatakan bahwa PNPM Mandiri perdesaan dalam perkembangan ekonomi desa maka perlu pengujian lanjutan, begitupula sebalikanya apabila Fhitung  lebih kecil Ftabel pada taraf signifikan 5% maka Ho diterima yang menyatakan bahwa PNPM Mandiri perdesaan tidak terpengaruh terhadap perkembangan ekonomi desa.

1. Analis korelasi produk moment

Digunakan mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y, rumus korelasi yang digunakan:

r =               nΣxy – (Σx) (Σy)

.         √{nΣx² – (Σx)²} {nΣy2 – (Σy)2}

Dimana : rxy  = koefisen korelasi

 X = nilai variabel X

Y = nilai variabel Y[[25]](#footnote-26)

selajutnya pengujian koefisien dengan menguji hipotesis ,yaitu Ho :p=0 lawan Hi ≠0. Kriteria pengujian adalah terdapat hubungan jika nilai r hitung lebih besar nilai r tabel pada sampel (N) tertentu pada taraf signifikan 5% demikian pula sebaliknya.

**HASIL PENELITIAN**

1. Hasil Penelitian
2. Gambaran Geografis Desa Paccing
3. Letak geografis Desa Paccing

Desa Paccing merupakan salah satu desa dari 17 desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone yang terletak ± 1 km dari ibu kota kecamatan dan ± 7 km dari ibu kota Kabupaten Bone. Wilayah Desa Paccing dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat.

Luas wilayah Desa Paccing sekitar 7,01 km². Adapun batas-batas wilayah Desa Paccing sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lappo Ase.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riattang Barat.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Macope.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Palakka.

Desa Paccing memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan Desa Paccing sebagai daerah yang sangat potensial pada bidang pertanian.

Secara umum penggunaan wilayah Desa Paccing sebagian besar untuk lahan pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perkuburan.

1. Keadaan aparat pemerintah Desa Paccing

Secara administratif wilayah Desa Paccing terdiri atas 5 dusun dan 8 RT yaitu Dusun I Paccing terdiri dari 2 RT, Dusun II Mauleng terdiri dari 2 RT, Dusun III Matekko terdiri dari 1 RT, Dusun IV Sawange terdiri dari 2 RT, dan Dusun V Bekku terdiri dari 1 RT.

1. **Pembahasan Hasil Penelitian**
2. **Gambaran Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone**

PNPM Mandiri Perdesaan Merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri ini dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di perdesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Gambaran PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone tergolong dalam kategori “sangat baik”, sebagaimana data yang diperoleh dari angket penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator dari PNPM Mandiri Perdesaan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar

Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana dasar di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terwujud melalui kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa kegiatan pembangunan di sektor pertanian seperti perkerasan jalan tani dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Desa Paccing dinilai cukup memadai dan memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin serta adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengadaan ataupun pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa tersebut.

Sehingga apabila ditinjau dari aspek kegiatan pembangunan dan perbaikan prasarana sarana dasar maka PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terlaksana dengan baik dan dibuktikan dengan hasil analisis rata-rata jawaban responden yang berada dalam kategori “sangat baik” dengan persentase 100%.

1. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan

Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terwujud melalui kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa kegiatan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelatihan pengembangan keterampilan terhadap masyarakat desa. Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang ada di Desa Paccing dinilai cukup memuaskan masyarakat setempat serta adanya manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dengan adanya pendidikan dan pelatihan pengembangan keterampilan yang dilaksanakan di desa.

Sehingga apabila ditinjau dari aspek peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan maka PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terlaksana dengan baik dan dibuktikan dengan hasil analisis rata-rata jawaban responden yang berada dalam kategori “baik” dengan persentase 52.27%.

1. Kegiatan peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi

Kegiatan peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terwujud melalui kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan berupa kelompok usaha ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat berjalan dengan baik. Kelompok usaha ekonomi tersebut mengalami peningkatan jumlah produksi maupun pendapatan yang cukup signifikan, hal tersebut tentunya didukung oleh keterampilan yang dimiliki para anggota kelompok usaha ekonomi tersebut.

Sehingga apabila ditinjau dari aspek kegiatan peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi maka PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terlaksana dengan baik dan dibuktikan dengan hasil analisis rata-rata jawaban responden yang berada dalam kategori “sangat baik” dengan persentase 84.09%.

1. Penambahan permodalan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)

Penambahan permodalan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terwujud melalui kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan berupa pemberian dana bergulir kepada beberapa masyarakat desa khususnya perempuan atau ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok simpan pinjam perempuan yang ada di desa tersebut. Masyarakat sangat antusias dan mendukung kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini dan dinilai bermanfaat dalam membantu perekonomian keluarga serta tak ada kendala yang cukup berarti selama pelaksanaan proses simpan pinjam tersebut.

Sehingga apabila ditinjau dari aspek Penambahan permodalan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) maka PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terlaksana dengan baik dan dibuktikan dengan hasil analisis rata-rata jawaban responden yang berada dalam kategori “sangat baik” dengan persentase 88.63%.

1. **Gambaran Perkembangan Ekonomi Desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone**

Pembangunan desa diharapkan dapat menekan angka urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Fokus pembangunan desa juga ini diharapkan dapat meminimalisasi kemerosotan aktivitas ekonomi di desa, diantaranya karena minimnya sumber daya manusia perdesaan yang bersedia bekerja disektor-sektor ekonomi perdesaan. Permasalahan pembangunan perdesaan senantiasa berhubunga dengan partisipasi ketenagakerjaan, akses dan kesempatan terhadap faktor produksi, dan informasi yang berkaitan dengan pasar. Kedua ketimpangan itulah kemudian mengemukan berbagai permasalahan yaitu kemiskinan, kesenjangan, kegagalan transformasi dan merosotnya kelembagaan lokal masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan penyajian data menurut teori dari Nugroho mengenai strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan diketahui bahwa gambaran Perkembangan ekonomi desa di Desa Paccing Kecamatam Awangpone Kabupaten Bone berada pada kategori “baik”, sebagaimana data yang diperoleh dari angket penelitian. Mengacu pada teori dari Nugroho mengenai strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan maka indikator Perkembangan ekonomi desa adalah sebagai berikut :

1. Strategi dasar dalam memecahkan permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian aspek strategi dasar dalam memecahkan permasalahan pada perkembangan ekonomi desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone berada pada kategori “cukup baik” dengan persentase 47.72%. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pengangguran yang masih tinggi dan masyarakat masih kesusahan dalam mendapatkan pekerjaan, kualitas sumber daya manusia relatif cukup tinggi, dan kendala-kendala atau hambatan masyarakat dalam menerima informasi terhadap pasar cukup rendah.

1. Pencapaian sasaran untuk memecahkan permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian aspek pencapaian sasaran untuk memecahkan permasalahan pada perkembangan ekonomi desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone berada pada kategori “baik” dengan persentase 50%. Hal ini dapat dilihat dari tingkat investasi masyarakat yang ada di desa masih rendah dan tingkat kontrak kerja masyarakat cukup baik serta adanya komitmen kredibel yang tinggi yang dibangun oleh pemerintah desa ditengah-tengan masyarakat.

1. Kebijakan Pendukung (secara tidak langsung)

Berdasarkan hasil penelitian aspek kebijakan pendukung (secara tidak langsung) pada perkembangan ekonomi desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone berada pada kategori “sangat baik” dengan persentase 100%. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi, tingkat pengembangan partisipasi masyarakat cukup tinggi, adanya penataan ruang dan pertanahan yang sering dilakukan oleh pemerintah desa setempat, serta adanya berbagai kebijakan ekonomi makro yang dijalankan di tengah-tengah masyarakat.

1. Kebijakan berorientasi program (secara langsung)

Berdasarkan hasil penelitian aspek kebijakan berorientasi program (secara langsung) pada perkembangan ekonomi desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone berada pada kategori “sangat baik” dengan persentase 52.27%. Hal ini dapat dilihat dari tingkat masyarakat terhadap sumber daya cukup tinggi, tingkat akses masyarakat terhadap teknologi cukup tinggi, tingkat akses masyarakat terhadap pasar cukup tinggi, serta tingkat akses masyarakat terhadap sumber-sumber pembiayaan cukup sedang.

1. **Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Perkembangan Ekonomi Desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui angket variabel X dan variable Y kemudian diolah dengan mengunakan SPSS 20, maka PNPM Mandiri Perdesaan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Hal tersebut sesuai dengan hasil uji regresi linear sederhana dan korelasi, yang menunjukkan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan ekonomi desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil olah data nilai r = 0,75 kemudian dikonsultasikan pada tabel interpretasi nilai r berada interval 0,60 – 0,799 yang memiliki tingkat pengaruh kuat. Selanjutnya setelah dilakukan uji regresi maka terdapat pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan ekonomi desa, hal tersebut sesuai dengan hasil sig = 0,75 > 0,05 maka PNPM Mandiri Perdesaan berpengaruh kuat terhadap perkembangan ekonomi desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

Jadi, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan sebuah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

**Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Perkembangan Ekonomi Desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Gambaran PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone berada pada kategori “sangat baik”. Berdasarkan Indikator antara lain, 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar, 2) Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, 3) Kegiatan peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi, dan 4) Penambahan permodalan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP).
2. Gambaran Perkembangan Ekonomi Desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone berada pada kategori “baik”. Berdasarkan dari indikator antara lain, 1) Strategi dasar dalam memecahkan permasalahan, 2) Pencapaian sasaran untuk memecahkan permasalahan, 3) Kebijakan pendukung (secara tidak langsung), dan 4) Kebijakan berorientasi program (secara langsung).
3. Ada Pengaruh yang tergolong “kuat” antara PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Perkembangan Ekonomi Desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil uji regresi terhadap variabel PNPM Mandiri Perdesaan dan perkembangan ekonomi desa. Disamping itu PNPM Mandiri Perdesaan berada dalam kategori “sangat baik” dan Perkembangan Ekonomi Desa berada dalam kategori “baik” dalam pelaksanaanya di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sehingga keduanya memiliki hubungan korelasi yang positif.

**Implikasi**

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang sosial ekonomi dan juga penelitian-penelitian selajutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka implikasi adalah sebagai berikut.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Perkembangan Ekonomi Desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone tergolong “kuat” yang dibuktikan dengan hasil uji regresi terhadap variabel X dan variabel Y dengan sig = 0,75 > 0,05.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat miskin yang ada di desa.
2. Diharapkan tingkat perkembangan ekonomi desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone yang berada pada kategori baik dapat ditingkatkan lagi menjadi sangat baik dengan cara mengoptimalkan berbagai strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan.
3. Dalam pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan ekonomi desa di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, pihak pemerintah maupun masyarakat hendaknya saling bersinergi dan proaktif terhadap segala bentuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang lebih baik kedepannya.

**REFERENSI**

Burhan, Bungin. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cetakan ke-1.Jakarta: Kencana Prenada Group

Bumdes.id”Pemberdayaan Mayarakat Desa.”.23 Januari 2018. <http://bumdes.id/blog/2017/12/11/apa-yang-dimaksud-dengan-pemberdayaan-masyarakat-desa-11/>

Damsar & Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi.* Edisi kedua. Jakarta :Kencana.

Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2010. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.

Direktorat Jenderal Cipta Karya.2010.*Modul Khusus Komunitas Musrembang*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2008. *PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Hidayat, Syarif. 2013. “Dampak Sosial Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Mansyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)”. *Skripsi.* Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Indrajit, Wisnu & Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.* Malang: Intrans Publishing.

Jhingan, ML. 1999. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Juliansyah, Noor.2012..*Metodologi Penelitian.*cetakan ke-6.Jakarta:Kencana

Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah.* Jakarta: Penerbit Erlangga

Muri, Yusuf.2014.*Metode Penelitian.*cetakan ke-1.Jakarta:Kencana

Nurmantoro, Bogi. 2011. “Analisis Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar”. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sugiono. 2015. *Metodologi Penelitian dan Pengembangan*. Cetakan ke-1. Bandung: Alfabeta

Sukardi. 2003. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*.Jakarta:PT Bumi aksara

Syani, Abdul. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan.* cetakan kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Syofian, Siregar. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif.* cetakan ke-1.Jakarta:Kencana

Theresia, Aprillia. dkk. 2015. *Pembangunan Bebasis Masyarakat.* Bandung: Alfabet.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Desa.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

1. Bogi Nurmantoro.2011. *Analisis Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.* Surakarta. hal.24 [↑](#footnote-ref-2)
2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2008. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*. 2008. hal. 2-3 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid p.3 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid. p.7-8 [↑](#footnote-ref-5)
5. M.L Jhingan.1999. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.Hal.5 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid. p.5-7 [↑](#footnote-ref-7)
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid p.16 [↑](#footnote-ref-9)
9. Direktorat Jenderal Cipta Karya . 2010. Modul *Khusus Komunitas Musrembang*. Jakarta: `.hal.16 [↑](#footnote-ref-10)
10. Mudrajad Kuncoro 2014.*Otonomi Daerah.*Jakarta: Penerbit Erlangga. Hal.423-424 [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdul Syani.2002.*Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan.Cetakan kedua.Jakarta:PT Bumi Aksara,hal.31* [↑](#footnote-ref-12)
12. Aprillia Theresia,dkk.2015.*Pembangunan Berbasis Masyarakat.*Bandung:Alfabeta,hal. 93-94 [↑](#footnote-ref-13)
13. Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2010. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum. .hal. 53 [↑](#footnote-ref-14)
14. Sarif Hidayat.21 Juni 2013.*Dampak Sosial Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Terhadap Kehidupan Masyarakat.*Yogyakarta,23-24. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid. p.24-26 [↑](#footnote-ref-16)
16. Wisnu Indrajit dan Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.*Malang: Intrans Publishing.Hal.15 [↑](#footnote-ref-17)
17. HAW Widjaja. 2014. *Otonomi Desa.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal.85 [↑](#footnote-ref-18)
18. Bumdes.id”Pemberdayaan Mayarakat Desa.”.23 Januari 2018. http://bumdes.id/blog/2017/12/11/apa-yang-dimaksud-dengan-pemberdayaan-masyarakat-desa-11/ [↑](#footnote-ref-19)
19. Sukardi.2003.*Metodologi Penelitian Pendidikan*.Jakarta.PT Bumi Aksara,.Hal-4 [↑](#footnote-ref-20)
20. Sugiono .2015.*metode penelitian dan pengembangan.*cet.1Bandung:Alfabeta, Hal.42 [↑](#footnote-ref-21)
21. Bungin Burhan.2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cetakan ke-1.Jakarta:Kencana Prenada Group.Hal.115 [↑](#footnote-ref-22)
22. Yusuf Muri.2014. *Metode Penelitian*.cetakan ke-1.Jakarta:Kencana.Hal.260 [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibid. p.189 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid. p.202 [↑](#footnote-ref-25)
25. Sireg ar Syofian.2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*.cetakan ke-1.Jakarta:Kencana.Hal.252 [↑](#footnote-ref-26)